

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DANA ALOKASI
KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA
MODAL DI SUMATERA BARAT**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

**Juita Sukraini, SE. M.Si / 1017116201/ Ketua
Witra Maison, SE. M.Si / 1022026304/ Anggota**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
AGUSTUS
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Sumatera Barat

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Juita Sukraini, SE. M.Si
NIDN : 1017116201
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Nomor HP : 081374654590
Alamat surel (e-mail) : jjuitasukraini@gmail.com

Anggota Tim
Nama Lengkap : Witra Maison, SE. M.Si
NIDN : 1022026304
Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Tahun Pelaksanaan : 2021
Sumber Dana : Mandiri
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 7.500.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp. 7.500.000,-

Solok, 15 Agustus 2021



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

(Juita Sukraini, SE. M. Si)
NIDN. 1017116201

Ketua,

(Juita Sukraini, SE.M. Si)
NIDN. 1017116201



Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY
(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM)
NIDN. 1019017402

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	1
1. PENDAHULUAN	1
2. KAJIAN PUSTAKA	3
3. METODE PENELITIAN	13
4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	17
5. PENUTUP	25
6. DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL DI SUMATERA BARAT

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Sekunder. Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Data dikumpulkan melalui dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disetiap pemerintah daerah Kota dan Kabupaten. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software 21,0 (*Statistical Product and Service Solution*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Provinsi Sumatera Barat. Artinya kontribusi yang disumbangkan oleh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal tidak terlalu jelas. Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan dari dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, hal inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Begitu juga dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam UU tersebut mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Serta menjelaskan tentang kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public service*). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah sangat bertalian erat dengan asas desentralisasi yang merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah, serta mendorong timbulnya inovasi.

Pemerintah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Tujuan dari pengalokasian ini adalah untuk mensejahterakan

masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita yang diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 1985 dalam Situngkir, 2009).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam.

Khususnya pada pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dari data laporan realisasi APBD dapat dilihat pada tahun 2010 saat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9% jumlah penerimaan DAK turun sebesar 27,9 milyar, dari segi alokasi belanja modal juga turun sebesar 131 milyar dari jumlah penerimaan tahun sebelumnya.

Begitu juga pada tahun 2011, saat pertumbuhan ekonomi 6,3% jumlah penerimaan DAK naik sebesar 21,5 milyar, jumlah alokasi belanja modal juga naik sebesar 275,5 milyar dari tahun sebelumnya. Dari data APBD Provinsi Sumatera Barat diatas, sulit untuk menentukan variabel yang lebih berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Pada dasarnya penelitian ini mereplikasi dari beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Mayasari dkk (2014) tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten buleleng. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan.

Pelealu (2013) tentang pengaruh dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pemerintah Kota Manado tahun 2003-2012. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan anggaran yang memiliki kontribusi terbesar terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan penerimaan daerah pemerintah Kota Manado tidak memberikan kontribusi yang optimal terhadap belanja modal.

Situngkir (2009) meneliti pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap alokasi anggaran Belanja Modal dengan mengambil sampel penelitian di Pemkab Sumatera Utara. Hasil penelitian tersebut variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Modal. Sedangkan variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Dari penelitian sebelumnya terdapat hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Alasan peneliti mengambil variabel dana alokasi khusus yaitu, peneliti ingin melihat pengaruh dari dana yang bersumber dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang sifatnya khusus tersebut terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?
2. Bagaimanakah pengaruh dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?
3. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi khusus secara simultan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi khusus secara simultan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Menambah, melengkapi sekaligus sebagai pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada menyangkut topik yang sama.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam bidang Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Provinsi dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai komponen Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus, dan dalam penyusunan Anggaran Belanja Modal.
4. Sebagai referensi dan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRD). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mendorong barang dan jasa yang diproduksi ke masyarakat bertambah (Sukirno, 2010:9).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula

kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2007:34):

$$G = \frac{\text{PDRB}_1 - \text{PDRB}_0}{\text{PDRB}_0} \times 100\%$$

Keterangan :

G : Laju pertumbuhan ekonomi

PDRB_1 : PDRB ADHK pada suatu tahun

PDRB_0 : PDRB ADHK pada tahun sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru (Boediono, 2010:28).

Yovita (2011) Pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah :

1) Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

2) Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3) Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4) Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat

proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.

5) Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Kebanyakan negara berkembang menghadapi banyak masalah dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Hambatan-hambatan terpenting yang dialami itu diantaranya adalah :

- 1) Kegiatan sektor pertanian masih tetap tradisional dan produktivitasnya sangat rendah
- 2) Kebanyakan negara masih menghadapi masalah kekurangan dana modal dan barang modal (peralatan produksi) yang modern
- 3) Tenaga terampil, terdidik dan keahlian keusahawanan penawarannya masih jauh dibawah jumlah yang diperlukan
- 4) Perkembangan penduduk sangatlah pesat
- 5) Berbagai masalah institusi, sosial, kebudayaan dan politik yang sering dihadapi.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah :

- a) Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memodernkan kegiatan ekonomi yang ada. Sedangkan langkah penting yang harus dilakukan adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru yang dapat mempercepat informasi kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional kepada kegiatan ekonomi yang modern.
- b) Mengembangkan infrastruktur, modernisasi pertumbuhan ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur yang berkembang, seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi dan penyediaan air, listrik dan jaringan telepon.
- c) Meningkatkan tabungan dan investasi, pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat rendah. Sedangkan pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan. Kekurangan investasi selalu dinyatakan sebagai salah satu sumber yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu syarat penting yang perlu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan tabungan masyarakat.
- d) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, dari segi pandangan individu maupun dari segi secara keseluruhan, pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi. Individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, jadi semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh.
- e) Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi, kebijakan pemerintah yang konvensional yaitu kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Untuk mengatasinya pada tahap mula dari pembangunan ekonomi perencanaan pembangun perlu dilakukan. Melalui perencanaan pembangunan dapat pula ditentukan sejauh mana investasi swasta

dan pemerintah perlu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pertumbuhan yang telah ditentukan.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Soetjipto (2011:86), Kata anggaran merupakan terjemahan dari kata “budget” dalam bahasa Inggris. Akan tetapi, kata tersebut sebenarnya berasal dari bahasa Perancis, “buogette” yang berarti *asmall bag* atau satu tas kecil. Kata budget tersebut pertama kali digunakan secara formal sebagai suatu rencana keuangan pemerintah pada tahun 1733, yaitu ketika Menteri Keuangan Inggris membawa satu tas kecil yang berisi proposal keuangan pemerintah yang akan disampaikan kepada parlemen, kemudian mengatakan *let's open the budget* atau mari kita buka budget.

Pengertian anggaran kemudian terus berkembang, *The national Committe on Governmental Accounting* atau Komite Nasional Akuntansi Pemerintahan di Amerika Serikat memberikan definisi anggaran sebagai berikut “*a budget is a plan of financial operation embodying estimates of proposed expenditures for a given period of time and the proposed means of financing them*”. Anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang diukur dalam satuan uang yang berisi perkiraan belanja dalam satu periode tertentu dan sumber yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut.

Lee, Jr dan Johnson menyatakan dalam Nordiawan (2011:69), bahwa *a budget is a document or a collection of document that refers to the financial condition of an organization..., including information on revenues, expenditures, activities, and purposes or goals..., a budget is prospective referring to anticipate future revenues, expenditures, and accomplishments*. Anggaran merupakan suatu dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan organisasi yang mencakup informasi keuangan, belanja, aktivitas, serta tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Mardiasmo, Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran, istilah ini terdapat dalam buku Nordiawan (2011:69).

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Maksud pernyataan tersebut adalah belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah daerah harus memiliki anggaran untuk belanja modal guna mendapatkan aset tetap. Anggaran harus disiapkan dengan jelas untuk mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang berorientasi kesasaran masa mendatang. Semakin besar sasaran yang dituju, maka anggaran juga mesti disusun dengan matang.

Menurut Halim (2004:15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana

kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Berbagai fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yaitu :

1. Fungsi Otorisasi, yaitu anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, yaitu anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi, yaitu anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi, yaitu anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 22, struktur APBD terdiri dari sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan.

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 27, dana perimbangan dibagi menjadi :

- a) Dana Bagi Hasil (DBH)
- b) Dana Alokasi Umum (DAU), dan
- c) Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang mencakup.

2. Belanja Daerah

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 23, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- b. Fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara.
- c. Urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja mencakup hal sebagai berikut :

- a) Belanja tidak langsung
- b) Belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung terdiri dari hal-hal berikut ini :
 - 1) Belanja pegawai.
 - 2) Belanja barang dan jasa.
 - 3) Belanja modal.

Dalam APBD selain anggaran, juga terdapat laporan realisasi anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Transfer DAK merupakan konsekuensi lahirnya Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah ; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (19) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerolehan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana

perimbangan pasal 61 ayat :

- (1) Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD minimal 10% dari besaran DAK yang diterima.
- (2) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan public antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, dan lingkungan hidup.

Dalam Ardhani (2010) kebijakan DAK bertujuan :

- a) Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
- b) Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/ terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
- c) Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
- d) Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- e) Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
- f) Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
- g) Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
- h) Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

2.4 Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 53 ayat (1): “Belanja Modal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya”.

Belanja Modal merupakan belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi atau penambahan aset. Belanja modal dialokasikan berdasarkan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana daerah.

Menurut Halim (2004 : 73), belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Belanja modal adalah pengurangan ekuitas dana lancar Akumulasi SiLPA yang digunakan untuk perolehan aset tetap atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan belanja modal diklasifikasikan lebih rinci kedalam belanja aset tetap dan belanja aset tetap lainnya (Bastian, 2014:213).

Berdasarkan penelitian Syaiful (2006) dalam Yovita (2011) dijelaskan bahwa belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama yaitu :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian pembangunan / pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meianto (2014) dinyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi belanja modal, yaitu :

- a) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55/2005).
- b) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (PP No. 55 Tahun 2005).
- c) UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hal ini yang menjadi pendorong utama agar pemerintah lebih optimal dalam menggali sumber kekayaan yang ada di daerah tersebut dengan sebaik-baiknya untuk tujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk melengkapi sarana prasarana pembangunan daerah guna pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah.
- d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Maksudnya semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan Pemerintah Daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik.
- e) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dana Bagi hasil merupakan penerimaan daerah daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dengan adanya Dana Bagi hasil pemerintah daerah diuntungkan karena dapat mengelola kekayaan daerah dan memberikan penerimaan daerah dan juga pembangunan infrastruktur.
- f) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Dana Sisa lebih perhitungan anggaran dapat digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dalam bentuk belanja modal.

Anggaran belanja modal merupakan suatu rencana belanja langsung yang diukur dalam satuan uang dan berisi tentang perkiraan belanja dalam satu periode tertentu. Sedangkan Alokasi adalah penentuan bagian dari suatu jumlah (uang, perbekalan, dsb) yang diperuntukkan bagi suatu daerah, badan usaha, organisasi. Sementara itu, alokasi anggaran adalah besaran dana atau biaya yang disediakan atau dikeluarkan bagi suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Jadi, alokasi anggaran belanja modal merupakan besaran dana yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan menambah aset yang memiliki nilai manfaat lebih dari dua belas bulan.

2.7 Pengaruh Antar Variabel Dan Hipotesis Penelitian

1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Dari penelitian yang dilakukan oleh Mayasari dkk (2014) Terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal, Hal ini dapat diartikan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal.

Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi anggaran belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana. Berdasarkan teori tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, maka penulis dapat menyimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

2) Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Dari penelitian yang dilakukan oleh Pelealu (2013) dapat diketahui bahwa dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan dana alokasi khusus (DAK) merupakan anggaran yang memiliki kontribusi terbesar terhadap belanja modal. Bila DAK suatu daerah naik, maka alokasi anggaran belanja modalnya juga akan cenderung naik.

Dari penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, maka penulis dapat menyimpulkan hipotesisnya seperti :

H2: Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

3) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, dan Dana Alokasi Khusus Secara Simultan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Ardhani (2010) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah). Hasil dari penelitian tersebut yaitu, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.

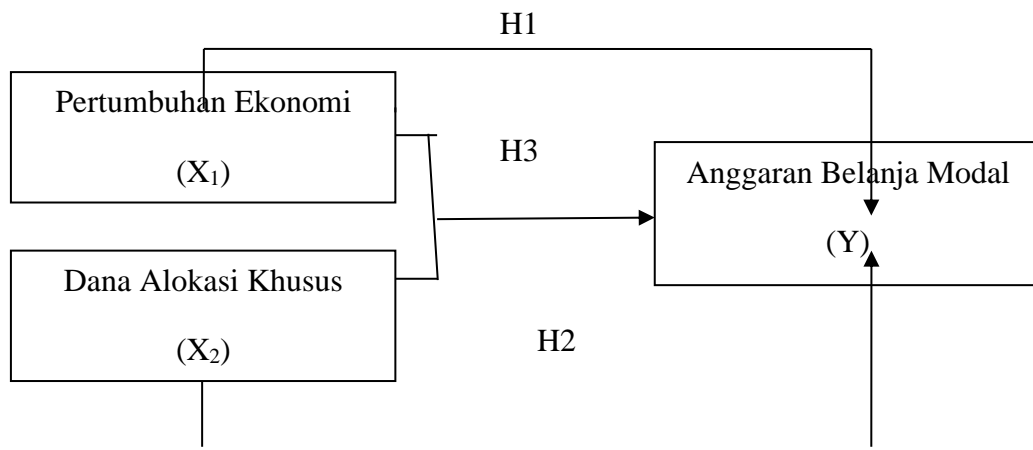
Dari penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh dalam pengalokasian anggaran belanja modal. Oleh karena itu secara simultan penulis menyimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H3: Pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Gambar 2.1 menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini :

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, Menurut Sugiyono (2012:11) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan kata lain merupakan penelitian yang menguji teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Hasil pengujian data digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2011:80), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2011:81). Untuk sampel, penulis menggunakan data laporan realisasi APBD pemerintah Provinsi Sumatera Barat .

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Menurut Kuncoro (2009:148) pengertian data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Data penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Barat melalui situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dengan website www.djpk.depkeu.go.id. dan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.6

3.5.1 Variabel Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan perumusan hipotesis, Variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Bebas (*Independen*)

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebasnya adalah :

1) Pertumbuhan Ekonomi (X_1)

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya (Yovita: 2011)

2) Dana Alokasi Khusus (X_2)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Data dana alokasi khusus yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi dana alokasi khusus Provinsi Sumatera Barat.

2. Variabel terikat (*Dependen*) / (Y)

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikatnya adalah anggaran belanja modal (Y).

Menurut Halim (2004 : 73), belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Data belanja modal yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran belanja modal Provinsi Sumatera Barat.

3.5.2 Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan variabel penelitian diatas, maka dapat dibuat definisi operasional variabelnya dalam bentuk tabel seperti berikut :

Tabel 3.1
Definisi operasional variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Pengukuran	Skala
Variabel independen a. Pertumbuhan ekonomi (X ₁)	kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya (Yovita: 2011)	Persentase pertumbuhan ekonomi pertahun $G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$ Ket : G : Laju pertumbuhan ekonomi PDRB ₁ : PDRB ADHK pada suatu tahun PDRB ₀ : PDRB ADHK pada tahun sebelumnya (Sukirno : 2007:34)	Rasio
b. Dana alokasi khusus (X ₂)	Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (19)	Realisasi penerimaan dana alokasi khusus pertahun dalam rupiah	Rasio
Variabel dependen Anggaran Belanja modal (Y)	Belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Halim (2004 : 73)	Anggaran belanja modal pertahun dalam rupiah	Rasio

3.6 Metode Analisa Data

Analisis data menggunakan program SPSS (*Statistical Package for the Social Science*) for windows versi 22.0. Data yang tersedia akan diuji dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Namun terlebih dahulu akan dilakukan pengujian asumsi klasik dengan tahap-tahap analisis sebagai berikut :

3.6.1 Asumsi klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011:160). Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normalprobability plot*. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Gejala multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance*-nya diatas 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih besar dari 10, Ghozali (2011:105).

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali 2011: 110). Uji yang dapat dilakukan dengan menghitung nilai Durbin watson (Dw), bila angka Dw diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi, untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW-test).

4. Uji heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011:139).

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heterokedastisitas. Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas.

3.6.2 Uji Regresi Linear Berganda

Analisa regresi linear berganda adalah analisa tentang hubungan antara satu *dependent variabel* dengan dua atau lebih *independent variable*, Umar (2010;126). Uji ini digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Uji ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X1 dan X2). Menurut Sugiyono (2010;192) persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y = variabel dependen (anggaran belanja modal)

a = Bilangan berkonstanta

b₁ b₂ = koefisien arah garis

X₁ = variabel independen (pertumbuhan ekonomi)

X₂ = variabel independen (dana alokasi khusus)

3.6.3 Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan data panel bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta kemampuan model dalam menjelaskan perilaku belanja modal dalam APBD. Dalam hal ini pengujian dilakukan secara parsial dan simultan.

1. Pengujian Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen

(Ghozali, 2011:98). Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan $\text{sig.} < 0,05$, maka hipotesis diterima artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan $\text{sig.} > 0,05$, maka hipotesis ditolak artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Pengujian secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05.

3. Uji koefisien determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi determinasi (*R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan obyek pada wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sesuai dengan namanya, wilayah provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km² ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.

Sumatera Barat berpenduduk sebanyak 4.846.909 jiwa dengan mayoritas beretnis Minangkabau. Provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten (kecuali kabupaten Kepulauan Mentawai) dinamakan sebagai nagari.

Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Provinsi ini memiliki daratan seluas 42.297,30 km² yang setara dengan 2,17% luas Indonesia. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17% merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 2.420.357 km dengan luas perairan laut 186.580 km². Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudera Hindia termasuk dalam provinsi ini.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, iklim Sumatera Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi, yaitu antara 22,6°C sampai 31,5°C. Provinsi ini juga dilalui oleh Garis khatulistiwa, tepatnya di Bonjol, Pasaman. Di provinsi ini

berhulu sejumlah sungai besar yang bermuara ke pantai timur Sumatera seperti Batang Hari, Siak, Inderagiri (disebut sebagai Batang Kuantan di bagian hulunya), dan Kampar. Sementara sungai-sungai yang bermuara ke pesisir barat adalah Batang Anai, Batang Arau, dan Batang Tarusan.

Terdapat 29 gunung yang tersebar di 7 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, dengan Gunung Kerinci di kabupaten Solok Selatan sebagai gunung tertinggi, yang mencapai ketinggian 3.085 m. Selain Gunung Kerinci, Sumatera Barat juga memiliki gunung aktif lainnya, seperti Gunung Marapi, Gunung Tandikat, dan Gunung Talang. Selain gunung, Sumatera Barat juga memiliki banyak danau. Danau terluas adalah Singkarak di kabupaten Solok dan kabupaten Tanah Datar, disusul Maninjau di kabupaten Agam. Dengan luas mencapai 130,1 km², Singkarak juga menjadi danau terluas kedua di Sumatera dan kesebelas di Indonesia. Danau lainnya terdapat di kabupaten Solok yaitu Danau Talang dan Danau Kembar (julukan dari Danau Diatas dan Danau Dibawah).

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena letaknya yang berada pada jalur patahan Semangko, tepat di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan Indo-Australia. Oleh karenanya, wilayah ini sering mengalami gempa bumi. Gempa bumi besar yang terjadi akhir-akhir ini di Sumatera Barat di antaranya adalah Gempa bumi 30 September 2009 dan Gempa bumi Kepulauan Mentawai 2010.

4.2 Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pertumbuhan ekonomi (PE) diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mendorong barang dan jasa yang diproduksi ke masyarakat bertambah (Sukirno, 2010:9). Berdasarkan data yang didapat dari BPS tentang pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari Tahun 2007 – 2015, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9%, tahun 2009 turun menjadi 4,3% namun tahun 2010 kembali naik menjadi 5,9%.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (19) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Transfer dari pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dengan leluasa dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik atau untuk keperluan lain.

Anggaran Belanja Modal merupakan anggaran dana belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi atau penambahan aset. Belanja modal dianggarkan dan dialokasikan berdasarkan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana daerah.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi (PE), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan alokasi anggaran belanja modal (ABM) di Sumatera Barat secara lengkapnya dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 4.1 Perkembangan pertumbuhan ekonomi, DAK, dan alokasi anggaran belanja modal Sumatera Barat Tahun 2007-2015

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Dana Alokasi Khusus (milyar)	Alokasi Anggaran Belanja Modal (milyar)
2007	6,34	72,252	365,331
2008	6,88	24,567	431,324
2009	4,28	47,179	581,486
2010	5,93	19,221	450395
2011	6,3	40,733	725,887
2012	6,4	32,501	700,403
2013	6,2	64,823	822,707
2014	5,8	54,108	704,695
2015	5,41	62,731	1.161,501

Sumber : BPS, Laporan Anggaran dan Realisasi APBD

4.3 Metode Analisa Data

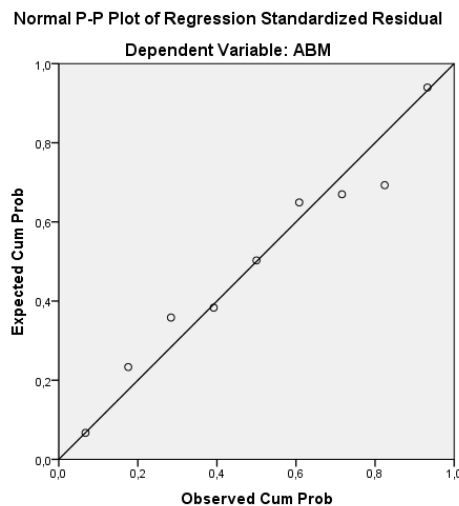
4.3.1 Uji asumsi klasik

a. Uji normalitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk model regresi yang baik digunakan data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Gambar pada grafik berikut ini menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

Gambar 1

Grafik normal P-Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data Sekunder yang Diolah SPSS versi 22

b. Uji multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji

multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. Uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PE	,952	1,051
DAK	,952	1,051

a. Dependent Variable: ABM

Sumber : Data Sekunder yang Diolah SPSS versi 22

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa seluruh variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi (PE) dan dana alokasi khusus (DAK) memiliki angka *Variance Inflation Factors (VIF)* di bawah 10 dengan angka *tolerance* yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dengan nilai *tolerance* PE dan DAK sebesar 0,952. Kedua variabel tersebut memiliki nilai *tolerance* diatas 0,10.

Untuk nilai VIF PE dan DAK sebesar 1,051, Kedua variabel independen tersebut memiliki nilai VIF dibawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi korelasi sehingga bebas dari gejala multikolinearitas.

c. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan untuk uji *Durbin-Watson (DW)*. Bila angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi, untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW-test). Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	,826

a. Predictors: (Constant), DAK, PE

b. Dependent Variable: ABM

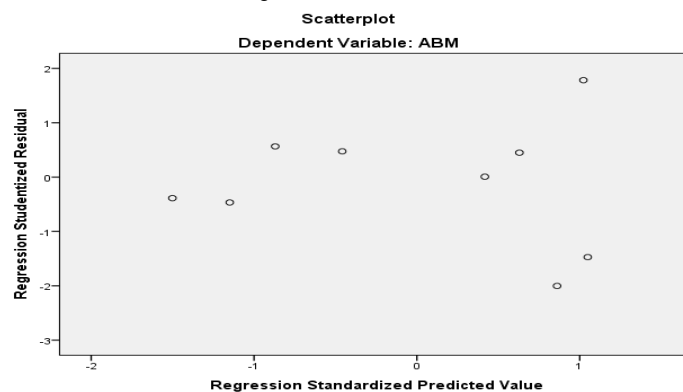
Sumber : Data Sekunder yang Diolah SPSS versi 22

Dari hasil uji autokorelasi diperoleh nilai *Durbin Watson (DW-test)* senilai 0,826. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan DW-test berada diantara -2 sampai dengan 2, maka ini berarti tidak terjadi autokorelasi / terbebas dari gejala autokorelasi.

d. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Sekunder yang Diolah SPSS versi 22

Dengan melihat grafik di atas, terlihat titik-titik tidak membentuk suatu pola dan menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model transformasi regresi yang digunakan.

4.3.2 Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif. Dengan menggunakan Program SPSS Versi 15.0 data diolah untuk dapat menunjukkan adanya pengaruh atau tidak antara variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dengan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	828,936	820,857		1,010	,352		
PE	-62,310	123,372	-,192	-,505	,632	,952	1,051
DAK	4,351	4,972	,333	,875	,415	,952	1,051

a. Dependent Variable: ABM

Sumber : Data Sekunder yang Diolah SPSS versi 22

Dari tabel uji regresi linear berganda diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 828,936 - 62,310 (X_1) + 4,351 (X_2)$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 828,936. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai variabel pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi khusus sama dengan nol, maka nilai variabel anggaran belanja modal sebesar 828,936 milyar rupiah.
2. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi (X_1) bernilai negatif sebesar 62,310. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% dan variabel dana alokasi khusus (X_2) dianggap tetap atau sama dengan nol, maka nilai alokasi anggaran belanja modal akan menurun sebesar 62,310 milyar rupiah. Saat pertumbuhan ekonomi naik, berarti masyarakat juga semakin sejahtera. Bila demikian, maka pemerintah akan menurunkan anggaran belanja modal yang akan dialokasikan ke pemerintah daerah tersebut untuk dialokasikan ke daerah lain guna pemerataan kesejahteraan masyarakat.
3. Nilai koefisien dana alokasi khusus (X_2) bernilai positif sebesar 4,351. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai dana alokasi khusus meningkat sebesar 1 rupiah dan nilai pertumbuhan ekonomi (X_1) dianggap tetap atau sama dengan nol, maka nilai anggaran belanja modal akan meningkat sebesar 4,351 milyar rupiah. Dana alokasi khusus merupakan salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat. Dana yang bersumber dari pemerintah pusat ini dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Pemerintah daerah pun harus sebaik mungkin mengelola dana tersebut demi pembiayaan pengeluaran daerah. Dengan pemanfaatan DAK yang optimal dan dengan sesuai sasaran, itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Situngkir (2009:68) dimana dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

4.4 Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian secara parsial atau uji t bertujuan untuk mengetahui bahwa variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri mempunyai pengaruh atau tidaknya terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	828,936	820,857		1,010	,352
PE	-62,310	123,372	-,192	-,505	,632
DAK	4,351	4,972	,333	,875	,415

a. Dependent Variable: ABM

Sumber : Data Sekunder yang Diolah SPSS versi 22

Nilai t_{tabel} dengan jumlah data 9 dan $\alpha = 5\%$ sebesar 2,571. Dari hasil pengujian diatas, didapat nilai t_{hitung} sebagai berikut :

1. Variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) diperoleh nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} sebesar $0,505 < 2,571$ dengan signifikan sebesar $0,632 > 0,05$. Nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari t_{tabel} dan nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, yang berarti H_1 ditolak.
2. Variabel DAK (X_2) diperoleh nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} sebesar $0,875 < 2,571$ dengan signifikan sebesar $0,415 > 0,05$. Nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari t_{tabel} dan nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa DAK juga tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Dengan demikian, maka H_2 ditolak.

2. Pengujian Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya untuk mengetahui apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	83379,767	2	41689,883	,638	,561 ^b
Residual	391787,888	6	65297,981		
Total	475167,655	8			

a. Dependent Variable: ABM

b. Predictors: (Constant), DAK, PE

Sumber : Data Sekunder yang Diolah SPSS versi 22

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai F_{hitung} sebesar 0,638 dengan nilai signifikan sebesar 0,561. Sedangkan untuk mencari F_{tabel} dengan jumlah sampel (n) = 9; jumlah variabel (k) = 2; taraf signifikan $\alpha = 5\%$; *degree of freedom* $df_1 = 2$ dan $df_2 (n-k-1) = (9-2-1) = 6$ diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 5,143.

Hasil pengolahan Anova diatas terlihat bahwa nilai F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} sebesar $0,638 < 5,143$ dengan tingkat signifikan sebesar $0,561 > 0,05$. Nilai F_{hitung} yang lebih kecil dari F_{tabel} dan nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan DAK secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam uji Koefisien Determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen atau variabel terikat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji R^2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,419 ^a	,175	-,099	255,53470	,826

a. Predictors: (Constant), DAK, PE

b. Dependent Variable: ABM

Sumber : Data Sekunder yang Diolah SPSS versi 22

Dari hasil SPSS *Versi 22.00 for windows*, dapat diperoleh nilai *R-Square* yaitu sebesar 0,175, artinya besar pengaruh variabel *independent* terhadap perubahan variabel *dependent* sebesar 17,5 % sedangkan sisanya 82,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang telah dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Provinsi Sumatera Barat. Artinya pertumbuhan ekonomi tidak memiliki kontribusi positif atau kontribusi yang disumbangkan oleh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal tidak terlalu jelas. karena peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan pengalokasian anggaran belanja modal. Bukan berarti bahwa dalam manajemen pengeluaran pemerintah daerah yang terkait dengan alokasi anggaran belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi anggaran belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan dari dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, hal inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Naik turunnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan dipengaruhi oleh pendapatan daerah itu sendiri dan dana yang ditransfer ke daerah seperti alokasi anggaran belanja modal. Karena semakin besar sasaran yang dituju dalam hal ini tingkat pertumbuhan ekonomi, maka anggaran dana yang dibutuhkan juga mesti disusun dengan matang. Jadi, temuan tidak mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Hasil diatas didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto (2007) yang membuktikan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) tidak signifikan mempengaruhi belanja modal.

b) Pengaruh DAK terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal yang artinya DAK tidak memiliki kontribusi positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal karena DAK hanya digunakan untuk tujuan khusus saja.

Menurut Kuncoro (2004) dalam Suhendra dkk (2015), DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus dalam dana alokasi khusus terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastuktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana dan kehutanan.

Penerimaan dana alokasi khusus pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2007 sampai 2015 terjadi kenaikan maupun penurunan. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Kuncoro diatas, DAK tidak memerlukan dana yang cukup besar, berbeda dengan belanja modal yang memerlukan dana

yang cukup besar. Jadi Dana Alokasi Khusus tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal karena Dana Alokasi Khusus ini merupakan dana transfer ke daerah untuk pembiayaan dari pengeluaran-pengeluaran daerah yang bersifat khusus seperti pembiayaan sarana dan prasarana fisik daerah. Meskipun DAK dan alokasi anggaran belanja modal sama-sama dialokasikan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat tapi ruang ruang lingkungannya berbeda, namun mereka akan tetap sejalan.

c) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan DAK secara simultan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi dan DAK terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Provinsi Sumatera Barat. Berarti secara bersama-sama variabel pertumbuhan ekonomi dan DAK tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Meskipun DAK merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, namun jumlah realisasi DAK tersebut tidak mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal di Provinsi Sumatera Barat tahun 2007-2015. Hal ini berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh belanja modal yang dianggarkan pemerintah bukannya mempengaruhi belanja modal.

Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja modal lebih fokus pada jumlah DAU, DAK, PAD, luas wilayah, dana bagi hasil, dan SiLPA. Meskipun DAK termasuk dalam fokus pemerintah tersebut, namun jumlah DAK yang ditransfer masih lebih kecil dari DAU yang juga merupakan dana perimbangan. Hal ini yang membuat pertumbuhan ekonomi dan DAK tidak mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009) yang menyatakan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Ardhani (2010) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (studi pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah). Hasil dari penelitian tersebut yaitu, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian belanja modal. Pada pengujian asumsi klasik diketahui bahwa data telah terdistribusi secara normal, bebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Provinsi Sumatera Barat. Artinya kontribusi yang disumbangkan oleh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal tidak terlalu jelas. Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan dari dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, hal inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
2. DAK tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal yang artinya DAK tidak memiliki kontribusi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. DAK tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja modal karena DAK merupakan dana transfer ke daerah untuk pembiayaan dari pengeluaran-pengeluaran daerah yang bersifat khusus seperti pembiayaan sarana dan prasarana fisik daerah.
3. Secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi dan DAK tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini terjadi karena pengalokasian anggaran belanja modal dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang seperti : DAU, PAD, luas wilayah, dana bagi hasil dan SiLPA.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti antara lain :

1. Masih adanya sejumlah variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini dan memiliki kontribusi yang besar dalam mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal.
2. Peneliti hanya menggunakan data realisasi laporan anggaran untuk dana alokasi khusus saja sedangkan untuk alokasi anggaran belanja modal peneliti menggunakan data anggaran.

5.3 Saran

Dari hasil kesimpulan tersebut peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih besar dan lebih luas atau tidak hanya sebatas satu provinsi saja. Serta data yang digunakan tidak terbatas pada nilai yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran saja, sebaiknya menggunakan rasio yaitu perbandingan realisasi laporan anggaran dengan alokasi belanja tidak langsung.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya akan menambah beberapa variabel independen dan dependen yang lebih kompleks dari penelitian ini, karena penelitian ini masih sangat sederhana sekali. Baik jenis-jenis penerimaan daerah lainnya maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhani, pungky. 2010. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (studi pada pemerintah kabupaten/kota di jawa tengah)*. Jurnal

- Arwati, dini, novita hariadi.2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*. Jurnal. Universitas Widyatama Bandung
- Bastian, indra. 2014. *Audit sektor publik tentang pemeriksaan pertanggung jawaban pemerintahan edisi 3*. Salemba empat. Jakarta
- Christy, fino andrea. 2009. *Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal dan kualitas pembangunan manusia*. Skripsi. Surabaya
- Darwanto, yulia yustika sari. 2007. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal*. Simposium nasional akuntansi X. Jogjakarta
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi Kelima)*. UNDIP. Semarang
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi keuangan daerah, edisi revisi*. Salemba empat. Jakarta
- Hari Adi, Priyo. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi IX.

[Http://belajarekonomiyukk.weebly.com/pertumbuhan-ekonomi.html](http://belajarekonomiyukk.weebly.com/pertumbuhan-ekonomi.html) diunggah pada 02/11/ 2015 jam 10:10 WIB

[Http://hariansinggalang.co.id/pertumbuhan-ekonomi-sumbar-stagnan-dalam-7-tahun-terakhir/](http://hariansinggalang.co.id/pertumbuhan-ekonomi-sumbar-stagnan-dalam-7-tahun-terakhir/). Diunggah pada 22/11/2015 jam 14:00 WIB

- Koncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset untuk bisnis & ekonomi, bagaimana meneliti dan menulis tesis?*.edisi 3. Erlangga. Yogyakarta
- Mayasari,luh putu rani,dkk. 2014. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng*. Jurnal. Singaraja
- Meianto. 2014. *Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dan luas wilayah terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di sumatera selatan*.jurnal.Palembang
- Nordiawan, deddi. Ayuningtias hertianti. 2011. *Akuntansi sektor publik edisi 2*. Salemba empat. Jakarta
- Pelealu, andreas marzel. 2013. *Pengaruh dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal kota manado tahun 2003-2012*. Jurnal. Manado
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. *Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 pasal 53 tentang belanja modal*
- _____. 2005. *Peraturan pemerintah nomor 55 tentang dana perimbangan*
- _____. 2004. *Undang-undang nomor 32 tentang keuangan negara*
- _____. 2004. *Undang-undang nomor 33 tentang dana alokasi umum*

- Santosa, Agus Budi. Mohamad Ainur Rofoq. 2013. *Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal pada kabupaten / kota (studi kasus di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur periode tahun 2007 – 2010)*. Jurnal.Semarang
- Situngkir, Anggiat. 2009. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara*. Tesis. Medan
- Soetjipto, kery. Prawoto sudikdiono. 2011. *Akutansi pemerintahan Republik Indonesia reformasi keuangan negara*. Mitra wacana media. Jakarta
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- _____. 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Suhendra dkk. 2015. *Pengaruh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan belanja pemeliharaan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di bali periode 2009-2013*. e-Journal S1 AkUniversitas Pendidikan Ganesha.Singaraja
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makro ekonomi teori pengantar*. Raja grafindo persada. Jakarta
- _____. 2010. *Makro ekonomi teori pengantar*. Raja grafindo persada. Jakarta
- Umar, Husein. 2010. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi 2. PT. Raja Gravindo Persada. Jakarta
- www.djpk.depkeu.go.id
- Yovita ,farah marta. 2011. *Pengaruh pertumbuhan ekonomi,pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (studi empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia periode 2008 – 2010)*. Skripsi. Semarang



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. Kubung Kab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juita Sukraini, SE. M.Si
NIDN : 1017116201
Pangkat/Golongan : Penata TK I/ III d
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Sumatera Barat**, yang dilaksanakan Tahun Akademik 2020/2021 bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas UMMY.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Solok, 15 Agustus 2021

Ketua,

(Juita Sukraini, SE. M. Si)
NIDN. 1017116201

Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY
(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM)
NIDN. 1019017402